



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi pemerintahan berbasis kinerja atau berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 3 Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
- 4 Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 6 Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
- 7 Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- 8 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
- 9 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
- 10 Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
- 11 Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

12. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan/sasaran strategis organisasi (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan SKPD).

BAB II

RUANG LINGKUP INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan/perjanjian kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 3

IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan peraturan ini :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten melakukan *review* dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi atas capaian kinerja IKU setiap SKPD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.

Pada tanggal 21 April 2022

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan yang Berdampak pada Penurunan Kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	BPS SKDP Terkait	<p>Penanggungjawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi Umum <p>Koordinator : Bappeda</p> <p>SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Dinas Pertanian dan Pangan 3. Dinas Perikanan 4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 5. Dinas PU Ciptakarya, Perumahan dan Permukiman 6. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 7. Dinas Perhubungan 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Dinas Lingkungan Hidup 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11. Dinas Pemadam Kebakaran

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	Indeks Daya Saing Pariwisata	Survei daya saing pariwisata Banyuwangi	- Hasil Survei	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (%)	$\frac{\text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n)} - \text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n-1)}}{\text{PDRB Sektor Unggulan Tahun (n-1)}} \times 100\%$	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Perikanan 3. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 4. Dinas PU Ciptakarya, Perumahan dan Permukiman 5. Dinas PU Pengairan 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah	- Hasil Survei	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 2. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman 3. Dinas Perhubungan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(30% x IKU) + (30% x IKA) + (40% x IKTL) IKU = indeks Kualitas Udara IKA = indeks Kualitas Air IKTL = indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKPLHD	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Resiko Bencana	Vulnerability Hazard x ----- Capacity Ket : Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari semua fenomena alam Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas	IRBI oleh BNPB	Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Pemadam Kebakaran
		Persentase Penduduk Miskin (%)		$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ <p>Keterangan : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.</p>	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 2. Dinas Pemuda dan Olahraga 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		1.2 Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	<p>Jumlah pengangguran ----- x 100 % Jumlah angkatan kerja</p>	<p>- BPS - Rekap data pengangguran - Rekap data angkatan kerja</p>	<p>Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian 2. Dinas Pemuda dan Olahraga</p>
			Gini Ratio	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$ <p>GR = Koefisien Gini F_{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i F_{ci} = Frekuensi kumulatif ari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i F_{ci-1} = Frekuensi kumulatif ari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)</p>	<p>- BPS - SKPD Terkait</p>	<p>Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>
			Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	<p>Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam penghitungan indeks Pembangunan Gender (IPG) ada tiga komponen penyusun IDG, yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.</p>	<p>- BPS - SKPD Terkait</p>	<p>Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana</p>

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
2	Membangun SDM Unggul berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif	Indeks Pembangunan Manusia		$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	BPS SKDP Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Pemuda dan Olah Raga 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6. Dinas Kesehatan 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8. Satuan Polisi Pamong Praja 9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan	Indeks Pengeluaran	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$	- BPS - SKDP Terkait	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pertanian dan Pangan 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		2.2 Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang berkarakter dan Berbudaya	Indeks Pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata - rata Lama Sekolah</p>	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ <p>AHH : Angka Harapan Hidup</p>	- BPS - SKPD Terkait	Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Kesehatan
			Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Survei masyarakat terhadap Solidaritas, Toleransi, dan Stabilitas yang memberikan implikasi sosio-kultural bagi pembangunan masyarakat dan bangsa Rumusan IKS : Nilai Solidaritas + Nilai Toleransi + Nilai Stabilitas ----- 3	- Hasil survey Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Satuan Polisi Pamong Praja 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	Survei untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan terdiri dari 7 dimensi yakni Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender	- Hasil Survei IPKD dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian - SKPD Terkait	Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap layanan pemerintah daerah kepada masyarakat dan dilakukan minimal satu tahun sekali	Hasil Survei indeks Kepuasan Masyarakat	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : Perangkat Daerah 1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda 3. Inspektorat 4. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5. Sekretariat DPRD 6. Badan Pendapatan Daerah 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Badan Kepegawaian Daerah 10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		3.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa	Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Hasil Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB	Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Sekretariat Daerah 2. Bappeda
			Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh KemenPAN-RB/Tim	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Inspektorat 2. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Sekretariat DPRD 4. Badan Pendapatan Daerah 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Indeks Profesionalisme Aparatur	Hasil penilaian profesionalisme ASN oleh BKN	Hasil penilaian oleh BKN	Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Badan Kepegawaian Daerah

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Inovasi Daerah (kategori)	Nilai Hasil Evaluasi Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Hasil Evaluasi Inovasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri	Penanggungjawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Administrasi Umum Koordinator : Bappeda SKPD Penyedia Data dan Pelaksana Program/Kegiatan (Cross Cutting) : 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
1. Dinas Pendidikan						
1	Meningkatkan indeks pendidikan	Indeks Pendidikan		$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata - rata Lama Sekolah	- BPS	Dinas Pendidikan
		1.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka harapan lama sekolah	Rasio jumlah penduduk usia 7-24 yang bersekolah ----- Jumlah penduduk usia 7-24 tahun Penjelasan: penjumlahan dari rasio jumlah penduduk usia 7-24 yang bersekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-24 tahun	BPS	- Bidang Pendidikan SD - Bidang Pendidikan SMP - Bidang Pendidikan Masyarakat

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	Jumlah penduduk usia 25 tahun ketas berdasarkan ijazah / pendidikan yang ditamatkan x Lama pendidikan yang dijalani ----- Jumlah penduduk usia 25 tahun Penjelasan : Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan atau jumlah hasil perkalian jumlah penduduk dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani dibagi jumlah penduduk	BPS	- Bidang Pendidikan SD - Bidang Pendidikan SMP - Bidang Pendidikan Masyarakat
		1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks kepuasan masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
2. Dinas Kesehatan						
1	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Indeks Kesehatan		$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$ AHH : Angka Harapan Hidup	- BPS - SKPD Terkait	Dinas Kesehatan
		1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan	Umur Harapan Hidup	ex = eox = E(X) Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata pertambahan umur seseorang yang diharapkan terus hidup pada umur x eo = rata-rata umur yang mungkin bagi bayi pada suatu periode rujukan	BPS	- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Bidang Pelayanan Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparat	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
3. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Perumahan dan Permukiman						
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui sektor infrastuktur	Indeks kepuasan layanan infrastruktur		Survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah	- Hasil Survei	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Perumahan dan Permukiman
		1.1 Meningkatnya infrastruktur penunjang ekonomi	Indeks kepuasan infrastruktur kebinamargaan	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur bidang kebinamargaan	Dokumen hasil survei	- Bidang Bina Marga
			Indeks kepuasan infrastruktur keciptakaryaan	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur bidang keciptakaryaan	Dokumen hasil survei	- Bidang Cipta Karya
			Indeks kepuasan infrastruktur penataan ruang	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur bidang penataan ruang	Dokumen hasil survei	- Bidang Penataan Ruang
			Indeks kepuasan infrastruktur perumahan dan permukiman	Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur bidang perumahan dan permukiman	Dokumen hasil survei	- Bidang Perumahan dan Permukiman
4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan						
1	Meningkatkan Ketersediaan Air Baku untuk keperluan irigasi dan keperluan lainnya	Indeks kepuasan layanan pengelolaan sumber daya air		Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap HIPPA sebagai pengguna layanan pengelolaan irigasi dan HIPPAM sebagai pengguna layanan pengelolaan air bersih	Laporan hasil survei	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Meningkatnya ketersediaan air irigasi melalui manajemen sumber daya air	Persentase ketersediaan air irigasi	Jumlah debit air di bendungan tahun (n) ----- x 100% Kebutuhan debit irigasi berdasarkan RTTG	Rekap data air bendungan, Curah hujan, dan Rencana tata tanaman global (RTTG)	- Bidang Operasional dan Pemeliharaan - Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan
		1.2 Meningkatnya ketersediaan air bersih melalui manajemen sumber daya air	Persentase ketersediaan air bersih	Jumlah rumah tangga terlayani air bersih ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga se Kabupaten Banyuwangi	- Rekap data penggunaan air bersih dan Data rumah tangga dari Dinas Kesehatan	- Bidang Pembangunan dan Pengembangan - Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana						
1	Meningkatkan Kepedulian Sosial	Indeks Kepedulian Sosial		Survei dimensi Nilai Solidaritas pada Variabel Kepedulian Sosial dalam Indeks Kesalehan Sosial	Dokumen Hasil Survei IKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB
	1.1 Menjamin Perlindungan Sosial	Persentase Pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	$\frac{\sum \text{PPKS yang dilayani}}{\sum \text{PPKS DTKS}} \times 100\%$		Laporan PPKS oleh Dinsos PPKB	- Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
	1.2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan	Dokumen hasil survei	- Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
2	Mengendalikan Angka Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total		$\text{TFR} = 5 \sum_{i=1}^7 \text{ASFR } i \quad \text{ASFR } i = \frac{b_i}{P_i} \times k$	- BPS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB
	2.1 Meningkatnya Cakupan Kesertaan Ber-KB	Persentase Cakupan KB Aktif		Jumlah Peserta KB Aktif ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Data peserta KB	- Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatkan Pelembagaan Pengarustamaan Gender pada Lembaga Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah Responsif Gender		Jumlah OPD yg sudah dilatih ----- x 100% Jumlah semua OPD	Data Pelatihan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB
		3.1 Meningkatnya Pemahaman terkait Implementasi tentang PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender)	Persentase Implementasi PPRG	Jumlah Desa yg sudah dilatih ----- x 100% Jumlah semua Desa	Data Pelatihan	- Bidang Pemberdayaan Perempuan
6. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian						
1	Meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan		PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n) - PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n-1) ----- x 100% PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun (n-1)	Data PDRB Kabupaten Banyuwangi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
		1.1 Meningkatnya pengembangan industri unggulan	Persentase peningkatan nilai penjualan (omset) IKM	Nilai penjualan (omset) tahun (n) - Nilai penjualan (omset) tahun (n-1) ----- x 100% Nilai penjualan (omset) tahun (n-1)	Dat Laporan Pendapatan	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri
2	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka		Jumlah pengangguran ----- x 100% Jumlah angkatan kerja	- BPS - Rekap data pengangguran - Rekap data angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
		2.1 Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase tingkat kesempatan kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja ----- x 100% Jumlah angkatan kerja	BPS	- Bidang Tenaga Kerja

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		2.2 Meningkatnya perlindungan dan Kesejahteraan Ketenaga Kerja	Persentase perlindungan tenaga kerja penerima upah pada perusahaan	Jumlah tenaga kerja penerima upah yang dilindungi ----- x 100% Jumlah tenaga penerima upah	- Rekap Data tenaga kerja penerima upah - Rekap data tenaga kerja penerima upah yang dilindungi	- Bidang Hubungan Industrial
3	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian
		5.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
7. Dinas Perhubungan						
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan		Hasil Survei indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Dokumen hasil survei	Dinas Perhubungan
		1.1 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dalam kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Laporan bobot angkutan jalan, bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan	- Bidang Lalu Lintas - Bidang Angkutan
8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian						
1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan SPBE	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik		Rata-rata nilai domain SPBE	Laporan Hasil SPBE dari Kemenpan	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan SPBE	Indeks Tata Kelola SPBE	Rata-rata nilai aspek domain Tata Kelola SPBE	Hasil Evaluasi SPBE (Domain Tata Kelola)	- Bidang Teknologi Informatika
				Indeks Layanan SPBE	Rata-rata nilai aspek domain Layanan SPBE	Hasil Evaluasi SPBE (Domain Tata Kelola)	- Bidang Informasi dan Komunikasi Publik - Bidang Statistik dan Persandian
		1.2	Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi yang profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei IKM	Hasil IKM	- Sekertariat
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
1	Meningkatkan daya saing pariwisata yang berkelanjutan	Indeks Daya Saing Pariwisata		Survei Daya Saing Pariwisata	- Hasil Survei	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		1.1	Meningkatnya daya tarik pariwisata Banyuwangi	Price Competitiveness Indicator (PCI) (Juta Rupiah)	PPowerparity (PPP) =Jumlah Wisatawan Mancanegara yang datang X Rata-Rata Tarif Hotel (Rp.553.215) X Rata-Rata Masa Tinggal	Data Wisatawan	- Bidang Produk Pariwisata
				Human Tourism Indicator (HTI)	Tourism Participation Index (TPI) = Jumlah Turis di Kabupaten Banyuwangi ----- Jumlah Penduduk di Kabupaten Banyuwangi	Data Wisatawan	- Bidang Pemasaran

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan		Survei untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan terdiri dari 7 dimensi yakni Dimensi Ekonomi Budaya, Dimensi Pendidikan, Dimensi Ketahanan Sosial Budaya, Dimensi Warisan Budaya, Dimensi Kebebasan Ekspresi Budaya, Dimensi Budaya Literasi, dan Dimensi Gender	- Hasil Survei IPKD dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian - SKPD Terkait	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		2.1 Meningkatnya pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	Persentase warisan budaya yang telah dikelola dan dilestarikan	Jumlah warisan budaya yang telah dilestarikan ----- x 100 Jumlah Total Warisan Budaya	Data warisan budaya	Bidang Kebudayaan
10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan						
1	Meningkatkan produktifitas dan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB ADHB kategori G (besar dan eceran); reparasi mobil dan sepeda motor)		PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tahun (n) - PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tahun (n-1) ----- x 100% PDRB ADHB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tahun (n-1)	BPS diolah SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		1.1 Meningkatnya pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan	Persentase koperasi berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset tahun (n) ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi tahun (n)	Laporan penilaian KSP/USP sehat dan data keragaan koperasi	- Bidang Koperasi
			Persentase UKM terhadap UMKM	Jumlah UKM non pertanian tahun (n) ----- x 100% Jumlah UMKM non pertanian tahun (n)	- BPS - Laporan perkembangan wirausaha Kab. Banyuwangi	- Bidang Usaha Mikro

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Pertumbuhan PDRB kategori G (besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor)	$\frac{\text{PDRB ADHB sektor perdagangan tahun (n)} - \text{PDRB ADHB sektor perdagangan tahun (n-1)}}{\text{PDRB ADHB sektor perdagangan tahun (n-1)}} \times 100\%$	BPS diolah SKPD	- Bidang Perdagangan - Bidang Pasar
			Indeks kepuasan masyarakat	Nilai indeks kepuasan masyarakat hasil survei	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
2	Membangun SDM unggulan berkarakter dan harmonisasi sosial yang kondusif	Indeks harga konsumen		Nilai indeks harga konsumen tahun (n)	- BPS diolah SKPD	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
		2.1 Meningkatnya daya beli masyarakat melalui stabilitas harga komoditas perdagangan	Indeks harga konsumen makanan dan minuman	Nilai indeks harga konsumen makanan dan minuman tahun (n)	-BPS	- Bidang Perdagangan
11. Dinas Pertanian dan Pangan						
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Prosentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB		$\frac{\text{PDRB sektor Pertanian tahun (n)} - \text{PDRB sektor Pertanian tahun (n-1)}}{\text{PDRB sektor Pertanian tahun (n-1)}} \times 100\%$ PDRB sektor pertanian = PDRB sub sektor tanaman pangan (ADHK) + PDRB sub sektor hortikultura (ADHK) + PDRB sub sektor perkebunan (ADHK) + PDRB sub sektor peternakan (ADHK) ADHK = Atas Dasar Harga Konstan	- BPS - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Tanaman Pangan - Bidang Perkebunan dan Hortikultura - Bidang Budidaya dan Usaha Peternakan - Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Bidang Ketahanan Pangan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian unggulan	Produktivitas sektor pertanian unggulan	$\frac{\text{Produktivitas padi tahun (n)/kwintal}}{\text{Luas panen padi tahun (n)/Ha}} \times 100\%$	- BPS - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	- Bidang Tanaman Pangan
2	Meningkatkan akses dan kualitas komoditas pangan	Angka konsumsi beras Kabupaten Banyuwangi		Koefisien x Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi Keterangan : Koefisien = Angka konsumsi beras nasional (data sensus, BPS)	- BPS	Dinas Pertanian dan Pangan
		2.1 Meningkatnya Ketersediaan Bahan Pokok Unggulan	Persentase ketersediaan bahan pangan pokok unggulan	$\frac{\text{Produksi beras tahun (n)/kwintal}}{\text{Angka konsumsi beras tahun (n)}} \times 100\%$	- BPS - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	Bidang Ketahanan Pangan
12. Dinas Perikanan						
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui produksi perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB Subsektor perikanan dalam PDRB		$\frac{\text{PDRB Subsektor perikanan Tahun (n) - PDRB Subsektor perikanan (n-1)}}{\text{PDRB Subsektor perikanan (n-1)}} \times 100\%$	- BPS - SKPD Terkait	Dinas Perikanan
		1.1 Meningkatnya pengelolaan perikanan dari hulu ke hilir berbasis optimalisasi sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat	Persentase peningkatan produksi perikanan	$\frac{\text{Realisasi produksi tahun (n) - Realisasi produksi tahun (n-1)}}{\text{Realisasi produksi tahun (n-1)}} \times 100\%$	- BPS - SKPD Terkait	- Bidang Perikanan Tangkap - Bidang Perikanan Budidaya - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Angka konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	Hasil survei sosial ekonomi nasional (SUSENAS)	- SUSENAS / Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	- Bidang Perikanan Tangkap - Bidang Perikanan Budidaya - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perikanan
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)		Jumlah Rata-rata IDM seluruh Desa se Kabupaten Banyuwangi	- Laporan Hasil Penghitungan Indikator IDM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		1.1 Meningkatnya Ketahanan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Perdesaan	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Perdesaan	Jumlah Rata-rata IKE seluruh Desa se Kabupaten Banyuwangi	- Dokumen lembaga ekonomi desa yang baik/berdaya - SKPD Terkait	- Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa
			Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Perdesaan	Jumlah Rata-rata IKS seluruh Desa se Kabupaten Banyuwangi	- Dokumen lembaga kemasyarakatan Desa yang Aktif - SKPD Terkait	- Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Sosial Budaya
2	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan Desa		Jumlah Rata-rata Nilai IKM seluruh Desa se Kabupaten Banyuwangi	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Layanan Publik Pemerintah Desa dan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Desa	Jumlah Rata-rata Nilai IKM seluruh Desa se Kabupaten Banyuwangi	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
14. Dinas Lingkungan Hidup						
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) Ket : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKU = indeks Kualitas Udara IKA = indeks Kualitas Air IKL = indeks Kualitas Lahan	IKPLH	Dinas Lingkungan Hidup
	1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) Ket : IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKU = indeks Kualitas Udara IKA = indeks Kualitas Air IKL = indeks Kualitas Lahan	IKPLH	- Bidang Pengawasan dan Pengendalian - Bidang Konservasi dan Rehabilitasi
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan Investasi		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n) - Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1) ----- x 100% Nilai Investasi Tahun Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun (n-1)	Nasional Single Window Investment	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1.1 Meningkatnya nilai realisasi Realisasi Investasi di Daerah	Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN		Jumlah nilai realisasi investasi PMA dan PMDN dalam satu tahun Anggaran	Nasional Single Window Investment	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan kualitas pelayanan investasi	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik di mal pelayanan publik		Hasil survei IKM yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran	Dokumen hasil pelaksanaan survei IKM yang dilaksanakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	Hasil survei IKM yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran	Dokumen hasil pelaksanaan survei IKM yang dilaksanakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga						
1	Meningkatkan Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		<p>Jumlah pemuda berwirausaha ----- x 100%</p> <p>Jumlah pemuda Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Ket : Jumlah pemuda berwirausaha yaitu Jumlah pemuda yang telah bekerja, menghasilkan suatu produk baik barang atau jasa untuk mendapatkan penghasilan. Jumlah pemuda keseluruhan Banyuwangi yaitu Jumlah keseluruhan pemuda usia 16-30 tahun se-Kabupaten</p>	Laporan data Pemuda wirausaha	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		1.1 Meningkatnya potensi sumber daya kepemudaan	Persentase pemuda terampil	<p>Jumlah Pemuda Terampil ----- x 100%</p> <p>Jumlah Keseluruhan Pemuda</p> <p>Ket : Pemuda Terampil = Target pemuda yang cakap dalam menerapkan hasil pelatihan (dalam tahun berjalan)</p> <p>Pemuda dilatih = Target pemuda yang dilatih mengikuti pelatihan (dalam tahun berjalan)</p>	Laporan kegiatan Bid.Pemuda	- Bidang Pemuda

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan Olahraga	Persentase atlit berprestasi		<p>Jumlah atlit yang berprestasi Provinsi dan Nasional ----- x 100%</p> <p>Jumlah atlit Kabupaten Banyuwangi</p> <p>Ket : Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti kejuaraan luar daerah</p> <p>Jumlah atlet keseluruhan : Jumlah keseluruhan atlet yang dikirim dalam mengikuti kejuaraan luar daerah</p>	Laporan kegiatan Bid.Olahraga	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		2.1 Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase prestasi olahraga	<p>Jumlah cabang olahraga berprestasi ----- x 100%</p> <p>Jumlah cabang olahraga</p> <p>Ket : Jumlah cabor yang berprestasi dalam mengikuti kejuaraan</p> <p>Jumlah Cabang Olahraga : Jumlah cabor keseluruhan</p>	Laporan kegiatan Bid.Olahraga	- Bidang Olahraga
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat		Formulasi penyusunan indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan penjumlahan dari Unsur-unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang dibagi dengan Aspek Masyarakat (AM) dikali 100 $IPLM = \sum \frac{IPLM_i}{AM} \times 100$	Rekap laporan jumlah perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pengunjung perpustakaan, perpustakaan berstandar nasional perpustakaan, masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan, dan anggota perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		1.1 Meningkatnya tingkat kegemaran membaca	Indeks tingkat kegemaran membaca	$TGM = \frac{(TMF + TMD + TJB)}{3} \times 100 \%$ TGM = Tingkat Kegemaran Membaca TFM = Tingkat Frekuensi Membaca TDM = Tingkat Durasi Membaca TJB = Tingkat Jumlah Buku Dibaca	Dokumen hasil survei tingkat kegemaran membaca	- Bidang Perpustakaan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		1.2 Meningkatnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Nilai tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	$T = \frac{(a+i+s+j)}{4}$ a = Persentase arsip aktif yang telah dibuat daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentasi jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Rekap daftar arsip aktif yang dibuat sarana temu balik, arsip inaktif yang di buatkan sarana temu balik, arsip statis yang dibuat sarana temu balik, dan arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	- Bidang Kearsipan
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		2.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	Meningkatkan Cakupan Administrasi Kependudukan	Rata-rata Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil		$\frac{\text{Jumlah rata-rata cakupan kepemilikan identitas kependudukan dan akta pencatatan sipil}}{2}$	Database administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		1.1 Meningkatnya kualitas administrasi peristiwa kependudukan	Cakupan kepemilikan identitas kependudukan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang memiliki identitas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$	Database administrasi kependudukan	- Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		1.2 Meningkatnya kualitas peristiwa penting pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	Jumlah persentase jenis pelayanan pencatatan sipil ----- x 100 Jumlah jenis layanan	Database administrasi kependudukan	- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		1.3 Meningkatnya kualitas pengelolaan data kependudukan	Persentase pengelolaan data kependudukan yang sesuai data konsolidasi Kemendagri	Jumlah penduduk dalam data konsolidasi bersih ----- x 100 Jumlah penduduk dalam database pelayanan	Database administrasi kependudukan	- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Sekretariat
19. Satuan Polisi Pamong Praja						
1	Meningkatkan Kepatuhan terhadap peraturan negara	Indeks Kepatuhan pada Peraturan Negara		Hasil indeks kepatuhan pada peraturan negara dalam survei indeks kesalehan sosial	Hasil survei Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Satuan Polisi Pamong Praja
		1.1 Meningkatnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah	Nilai kepatuhan terhadap peraturan daerah	Hasil survei kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Dokumen hasil survei kepatuhan terhadap peraturan daerah	- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah - Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
		2.1 Meningkatnya kualitas tata kelola dan layanan publik	Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	Realisasi pemenuhan layanan pendukung urusan pemerintahan ----- X 100 Target pemenuhan layanan pendukung urusan pemerintahan	Dokumen laporan layanan pendukung urusan pemerintahan	- Sekretariat
20. Dinas Pemadam Kebakaran						
1	Menciptakan ketahanan daerah dalam Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Indeks Kebakaran dan Keselamatan Kebakaran		30% ketepatan waktu rekomendasi proteksi kebakaran + 30% edukasi proteksi kebakaran + 40% response time	Data Laporan Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
		1.1 Meningkatnya pelayanan kesiapsiagaan dan pengendalian bahaya kebakaran	Indeks kepuasan masyarakat bidang pemadam kebakaran	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Bidang Pencegahan - Bidang Pemadaman dan Penyelamatan - Sekretariat
			Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran	Laporan kejadian kebakaran	- Bidang Pencegahan - Bidang Pemadaman dan Penyelamatan
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dalam rangka peningkatan SAKIP Kabupaten Banyuwangi	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Nilai pada komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	LHE SAKIP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		1.1 Terpenuhinya nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Nilai komponen perencanaan kinerja pada SAKIP	Nilai pada komponen perencanaan kinerja pada SAKIP (Review SAKIP Inspektorat)	LHE SAKIP Inspektorat	- Bidang Perencanaan Pembangunan - Bidang Ekonomi - Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan - Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		1.2 Tercapainya sasaran pembangunan daerah	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	Hasil monev SKPD pada Tabel 17 kolom	Tabel 17 kolom	- Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
		1.3 Terpenuhinya persentase hasil riset yang dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan	Jumlah hasil riset bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan ----- x 100 % Jumlah hasil riset bidang penelitian dan pengembangan	Hasil riset bidang penelitian dan pengembangan	- Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian
21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap LKPD		Nilai Penilaian / Evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 2. efektivitas sistem pengendalian internal	Hasil Evaluasi BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		1.1 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD tepat waktu	APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Perda / Perbup APBD	- Bidang Anggaran
			Rata-rata deviasi realisasi belanja dan pendapatan terhadap total belanja dan total pendapatan dalam APBD	100% - (realisasi belanja x 100%) + 100% - (realisasi pendapatan x 100%) ----- 2	Laporan Realisasi Pendapatan dan belanja dalam 1 tahun anggaran	- Bidang Pengelolaan Keuangan
			Penyelesaian dan Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	- Bidang Akuntansi

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	Penyelesaian Laporan Barang Milik Daerah maksimal 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir karena Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk Menyusun Neraca Pemerintah Daerah	Laporan Barang Milik Daerah (LBMD)	- Bidang Aset
2	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Sekretariat
		2.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Sekretariat
22. Badan Pendapatan Daerah						
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	(Realisasi PAD tahun n) - (Realisasi PAD tahun n - 1) ----- x 100 % Realisasi PAD tahun n - 1	Laporan Realisasi PAD	Badan Pendapatan Daerah
		1.1 Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi PAD ----- x 100 % Target PAD	Laporan Realisasi PAD	- Bidang Pendataan dan Validasi - Bidang Penagihan dan Pemeriksaan
23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan						
1	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalisme ASN		Hasil penilaian profesionalisme ASN oleh Kementerian Dalam Negeri	Dokumen hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		1.1 Meningkatnya Kualitas ASN Daerah	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang telah mengikuti diklat ----- x 100 % Jumlah SDM Aparatur	Laporan Hasil Pelaksanaan Diklat	- Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai - Bidang Pengadaan, Mutasi dan Data Pegawai

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Pegawai yang berkinerja baik	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang berkinerja baik}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100 \%$	Dokumen hasil penilaian	- Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
		1.2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan ASN	Dokumen hasil survei	- Sekretariat
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
1	Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana		0,6 Kesiapsiagaan + 0.4 Ketahanan) x 100%	Dokumen indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1.1 Menurunnya indeks Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	0,6 Kesiapsiagaan + 0.4 Ketahanan) x 100%	Dokumen indeks Ketahanan Daerah (IKD)	- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Bidang Kedaruratan dan Logistik - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Indeks relasi antar manusia		Hasil indeks relasi antar manusia dalam survei indeks kesalehan sosial	Dokumen Hasil survei Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks etika dan budi pekerti		Hasil indeks etika dan budi pekerti dalam survei indeks kesalehan sosial	Dokumen Hasil survei Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
		1.1 Meningkatnya pemahaman dan sikap masyarakat tentang nilai-nilai kebangsaan	Tingkat konflik di masyarakat	Jumlah konflik yang ada dimasyarakat	Laporan FKUB / FPK dan tim Stabilitas Daerah tiap tahun	- Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan - Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik
			Persentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik untuk pembangunan daerah	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya ----- x 100 % Jumlah daftar pemilik tetap (DPT)	Laporan hasil Pemilu	- Bidang Budaya Politik dan HAM
2	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2.1 Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Sekretariat
26. Sekretariat Daerah						
1	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Layanan Publik	Nilai LPPD		Hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri/Tim	Dok. Hasil penilaian	- Sekretariat Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat		Hasil survei pelayanan publik pada SKPD secara Internal / Eksternal	Dok. Hasil survei	- Sekretariat Daerah
		1.1 Meningkatnya Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Pemerintahan dan Sosial	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	Fasilitasi permasalahan pertanahan ----- x 100% Jumlah pengaduan permasalahan pertanahan	Dok laporan rekapitulasi permasalahan pertanahan	Bag. Pemerintahan
			Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dok. Hasil penilaian	Bag. Pemerintahan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitasi	Jumlah bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitasi ----- x 100% Jumlah pengajuan bantuan hukum	Dok. laporan rekapitulasi permasalahan hukum	Bag. Hukum
			Persentase terlaksananya pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat yang tepat dan akurat	Jumlah pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat (bantuan hibah) yang selesai dan sesuai ketentuan berlaku -----x 100% jumlah total pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat (bantuan hibah)	Dok. Laporan rekapitulasi bantuan hibah	Bag. Kesejahteraan Rakyat
		1.2 Meningkatnya Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan perekonomian yang dimanfaatkan menjadi kebijakan	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang dimanfaatkan menjadi kebijakan ----- x 100% Jumlah total rumusan kebijakan perekonomian yang disusun	Dok. Kebijakan KDH Bidang Perekonomian	Bag. Perekonomian
			Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Total belanja pengadaan barang/jasa yang melalui LPSE ----- x 100% jumlah total belanja pengadaan barang/jasa	Dok. Laporan pengadaan barang/jasa	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa
		1.3 Meningkatnya Pembinaan, Penataan dan Pengkoordinasian dalam Perumusan Kebijakan dan Penyelenggaraan di Bidang Administrasi Umum, Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan penataan organisasi menuju organisasi yang efektif dan efisien	Jumlah OPD yang efektif dan efisien ----- x 100% Total OPD)	Dok. Hasil evaluasi	Bag. Organisasi
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah berdasarkan rewiuw Inspektorat	Dok. Hasil evaluasi	Bag. Perencanaan dan Keuangan
			Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	Jumlah pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu ----- x 100% Jumlah total pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu yang dilaksanakan	Dok. Laporan rekapitulasi Pelayanan KDH/WKDH	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase realiasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah realisasi penyediaan sarana dan prasara perkantoran ----- x 100% rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)]	Dok. Laporan realisasi penyediaan sarana dan prasara perkantoran	Bag. Umum
27. Sekretariat DPRD						
1	Meningkatkan fasilitas Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas Alat Kelengkapan DPRD	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda		Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda ----- x 100 % Jumlah Raperda dalam propemperda	Rekap jumlah perda yang sahkan	Sekretariat DPRD
		Persentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti -----x 100 % Jumlah Pengaduan Masuarakat	Rekap Jumlah Pengaduan Masyarakat	Sekretariat DPRD
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	Sekretariat DPRD
	1.1 Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda		Jumlah Raperda yang disahkan menjadi Perda ----- x 100 % Jumlah Raperda dalam propemperda	Rekap jumlah perda yang sahkan	- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
	1.2 Meningkatkan layanan fasilitas keluhan / pengaduan masyarakat	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti -----x 100 % Jumlah Pengaduan Masuarakat	Rekap Jumlah Pengaduan Masyarakat	- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
	1.3 Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh aparatur	Dokumen hasil survei kepuasan masyarakat	- Bagian Umum - Bagian Perencanaan & Keuangan
28. Inspektorat						

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN (Penanggungjawab)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Persentase penerapan maturitas SPIP dan manajemen resiko		Jumlah SKPD yang meningkat nilai SPIP dan nimali manajemen resiko ----- x 100% Jumlah SKPD yang di evaluasi	Laporan Hasil Quality Assurance (QA) oleh Perwakilan BPKP Prop Jatim	Inspektorat
		1.1 Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan level Kapasitas APIP	Hasil Quality Assurance (QA) oleh Perwakilan BPKP Prop Jatim	Laporan Hasil Quality Assurance (QA) oleh Perwakilan BPKP Prop Jatim	- Inspektorat Pembantu I - Inspektorat Pembantu II - Inspektorat Pembantu II - Inspektorat Pembantu IV
29. Kecamatan						
1	Meningkatkan Tata Kelola dan Pelayanan Pemerintahan yang baik	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		Laporan Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat	Laporan Hasil Penilaian SAKIP Inspektorat	Kecamatan
		1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali	Hasil survei	- Sekretariat Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat - Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan

BUPATI BANYUWANGI

ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS